

umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

## 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan dokumen perencanaan strategis 2018-2023 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

**Tabel 3.1**Perbandingan Pencapaian Sasaran Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	Satuan		Tahun 202	2	Tahun 2023			
	Sasaran		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79	79,43	100,5%	80	88,12	110,1%	
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	19.75	20,45	103,5%	20	23,40	117%	

Sasaran ini memiliki 2 (dua) buah indikator yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang realisasinya sebesar 23,40% dari target yang ditetapkan sebesar 20%. Pendapatan Asli Daerah mencapai Realisasi sebesar Rp 554.737.939.709,- dari Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.371.008.064.794,-.

Pendapatan Asli daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah dengan target sebesar



Rp.510.759.250.000,00,- dan realisasi sebesar Rp.338.160.104.269,00,- atau 66,21% yang didalamnya terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan capaian realisasi tertinggi pada Pajak Air Tanah dengan capaian 106,06% dan capaian realisasi terendah pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian hanya sebesar 23,57%.

- 2. Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.41.449.934.774,00,dan realisasi sebesar **Rp.20.397.567.606,00,**- atau **49,21%** yang didalamnya terdapat Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Retribusi Jasa Umum dengan capaian sebesar 83,00% dan capaian realisasi terendah Retribusi Jasa Usaha dengan capaian hanya sebesar 34.51%.
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target *Rp.9.717.532.000,00,-* dan realisasi sebesar *Rp.7,427,509,729,-* atau *76,43%* yang didalamnya terdapat Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD dengan capaian sebesar *77.50%*.
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target sebesar *Rp.226.158.063.521*,- dan realisasi sebesar *Rp.*



188.869.583.295,- atau 83,51% yang didalamnya terdapat Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Pendapatan Bunga dengan capaian sebesar 145,54% dan capaian realisasi terendah pada Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain dengan capaian hanya sebesar 0.00%.

Berdasarkan capaian indikator yang telah disebutkan diatas, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh anggaran berjumlah Rp.28.963.549.780 dan realisasi sebesar Rp.25.631.461.338 meraih capaian kinerja 110,1%. Besaran efisiensi dari penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((28.963.549.780 \ x \ 1.11) - (25.631.461.338))}{\sum_{i=1}^{n} ((28.963.549.780 \ x \ 1.11)} \ x \ 100$$

$$E = 19,55\%$$

Kemudian untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh anggaran berjumlah Rp.3.941.957.300 dan realisasi sebesar Rp.3.160.218.493 meraih capaian kinerja 117%. Besaran efisiensi dari penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((3.941.957.300x \ 1.17) - (3.160.218.493))}{\sum_{i=1}^{n} ((3.941.957.300 \ x \ 1.17)} \ x \ 100$$

$$E = 31,48\%$$



Selain efisiensi penggunaan sumber daya, Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang kewenangannya pada sektor Pajak Daerah mendapatkan kenaikan capaian Pajak Daerah sebesar 4 Miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, yakni :

- Kegiatan uji petik tempat wisata
- Penerbitan aturan relaksasi pajak daerah terkait piutang daerah
- Melaksanakan operasi sisir kecamatan terkait optimalisasi pajak daerah (pembinaan kolektor dan koordinator PBB serta konsultasi dan pelayanan pajak Daerah) Tim Bapenda Kerja Sama Dengan Tim BJB
- Pendataan & Pemutakhiran data objek pajak baru semua jenis pajak
- Penguatan untuk wajib pajak lama dan mengundang calon wajib pajak baru untuk sosialisasi
- Penyempurnaan Integrasi Sistem Bapenda dan sistem *host-to-host* BJB secara *real time*
- Penguatan sumber daya manusia, terutama monitoring dan pengendalian petugas lapangan

## 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam Proses pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 buah sasaran dan 2 buah indikator. Adapun Sasaran tersebut didukung pula oleh sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, tabel berikut ini akan menguraikan, anggaran, realisasi dan capaian kinerja per program:



## Tabel 3.2 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.963.549.780	25.631.461.338	88,5		Tinggi
2	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	20 %	23,40%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.941.957.300	3.160.218.493	80,17		Tinggi
					- Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100.000.000	0	0	1 Dokumen	Sangat Rendah
					- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	185.468.300	83.360.300	44,95	12 Laporan	Sangat Rendah



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	86.400.000	86.290.400	99,87	5 Kegiatan	Sangat Tinggi
					- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	239.387.700	209.364.588	87,46	9 Jenis	Tinggi
					- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	509.915.400	468.832.084	91,94	8 Jenis Pajak	Sangat Tinggi
					- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	450.000.000	99.800.000	22,18	6 Aplikasi	Sangat Rendah
					- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	344.180.500	329.287.150	95,67	- 6 Perusahaan - 17 Kecamatan	Sangat Tinggi



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- Penetapan Wajib Pajak Daerah	209.999.800	209.153.980	99,6	464766 NOP	Sangat Tinggi
					<ul> <li>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</li> </ul>	325.571.500	306.883.000	94,26	12000 Layanan	Sangat Tinggi
					- Penagihan Pajak Daerah	1.281.100.000	1.177.564.891	91,92	- 1 Kegiatan - 12 Laporan - 12 Laporan	Sangat Tinggi
					- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	31.399.900	28.064.500	89,38	12 Laporan	Tinggi
					<ul> <li>Pengendalian,</li> <li>Pemeriksaan dan</li> <li>Pengawasan Pajak</li> <li>Daerah</li> </ul>	141.598.500	125.763.400	88,82	- 4 Kegiatan - 12 Laporan	Tinggi
					- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.935.700	35.854.200	97,07	4 Laporan	Sangat Tinggi



Maka berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa capaian realisasi anggaran program dengan penjelasan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 38 sub kegiatan dan anggaran sebesar *Rp.28.963.549.780*, dan terealisasi sebesar *Rp.25.631.461.338*, atau **88,5**%.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 13 sub kegiatan dan Anggaran sebesar *Rp.3.941.957.300*,- dan terealisasi sebesar *Rp.3.160.218.493*,- atau **80,17%**.

Adapun total capaian realisasi anggaran program adalah sebesar **87,5**% Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan realisasi anggaran adalah **tinggi**.



## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2023 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dari hasil analisis kinerja, maka diperoleh capaian realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **87,5**% yang berarti **tinggi** adapun capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Masyarakat yang didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja utama dengan pencapaian sasaran strategis sebesar **88,12** yang berarti **tercapai**, dengan tingkat efisensi anggaran sebesar **19,55**%
- Rasio Pendapatan Asli Daerah yang didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja utama dengan pencapaian sasaran strategis sebesar **23,40**% yang berarti **tercapai**, dengan Tingkat efisiensi anggaran sebesar **31,48**%

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah:

- a. Optimalisasi Sumber daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing:
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas dengan cara:
  - 1. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan



potensi Pendapatan Daerah.

- 2. Mengintensifkan Potensi daerah yang ada melalui Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah.
- 3. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan ekstemal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.

Demikianlah, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya menjadi cerminan bagi Bapenda Kabupaten Purwakarta sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya menuju tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang lebih baik.

Purwakarta, Februari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd NIP. 19680911 199302 1 001